

KONSEP MANAJEMEN MUTU INTERNAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

Niken Ristianah, Vilasofia Yustikasari, Abdul Kholiq¹

STAI Darussalam Nganjuk

Email: nikenristianah1@gmail.com, vilasofia33@gmail.com, akholiq44@gmail.com

Abstract

Schools, as centers for implementing educational activities, are structured institutions that play a role in improving the quality of education. As micro-institutions directly involved in producing a quality generation of Indonesians, schools deserve significant attention from the government and society. Ideally, schools with a high-quality correlation will produce high-quality input, process, and output. Educational quality management should be a key agenda for improving educational quality. The concept of educational quality management within the school environment can be seen in student exam results. Furthermore, it examines how alumni apply their knowledge in real life. Behavioral changes across the cognitive, affective, and psychomotor domains can be demonstrated by student participation in community life.

Keywords: *Internal Quality Management, Educational Institutions*

Abstrak

Sekolah sebagai salah satu pusat pelaksana kegiatan pendidikan merupakan lembaga terstruktur yang memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah sebagai institusi mikro yang berperan langsung dalam mencetak generasi Indonesia yang berkualitas, sudah seharusnya mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan masyarakat. Sekolah yang berkolerasi mutu sekolah, idealnya akan menghasilkan *input*, proses dan *output* yang baik pula. Manajemen mutu pendidikan hendaknya menjadi agenda utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Konsep manajemen mutu pendidikan di lingkungan sekolah dapat dilihat dari hasil ujian peserta didik. Selain itu, bagaimana alumni dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata. Perubahan tingkah laku yang meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotorik dapat dibuktikan dengan peran serta peserta didik dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: *Manajemen Mutu Internal, Lembaga Pendidikan*

Pendahuluan

Pendidikan adalah proses budaya oleh generasi yang mengambil peran dalam sejarah, walaupun pendidikan merupakan proses budaya masa kini dan membuat budaya masa depan. Begitu pentingnya fungsi pendidikan bagi pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa, sehingga eksistensi suatu bangsa dan kemajuan peradabannya merupakan hasil dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.² Seperti yang sudah dirumuskan dalam tujuan Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang baik, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya.³

¹STAI Darussalam Nganjuk

²Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Umum, 2017), 14.

³Muhibbuddin Abdulmuid, *Manajemen Pendidikan* (Jawa Tengah: Pengging Mangkunegaran, 2013), 81.

Sekolah sebagai salah satu pusat pelaksana kegiatan pendidikan merupakan lembaga terstruktur yang memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah sebagai institusi mikro yang berperan langsung dalam mencetak generasi Indonesia yang berkualitas, sudah seharusnya mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan masyarakat. Sekolah yang berkolerasi mutu sekolah, idealnya akan menghasilkan *input*, proses dan *output* yang baik pula.⁴

Mutu menjadi aspek terpenting dalam setiap organisasi. Dimana mutu diyakini sebagai modal utama dalam menghadapi persaingan organisasi. Oleh sebab itu, mengelola sebuah organisasi haruslah secara komprehensif dan terintegrasi. Menurut Tanner dan De Toro dalam Barnawi dan M. Arifin menjelaskan bahwa pengelolaan manajemen mutu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Manajemen mutu berusaha meningkatkan mutu pekerjaan, produktivitas dan efisiensi melalui perbaikan kinerja baik internal maupun eksternal.⁵

Manajemen mutu internal terpacu oleh adanya otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan. Otonomi pendidikan yang diberikan kepada sekolah, menghasilkan sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolah sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program dan rencana strategisnya yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.⁶Penerapan manajemen mutu internal dapat menghasilkan produk yang terjamin mutunya. Sistem manajemen ini memerhatikan pertimbangan, aspirasi atau keinginan pelanggan. Selain itu, faktor-faktor yang terkait dengan proses produksi dikelola juga dengan baik agar menghasilkan produk yang melampaui harapan konsumen.

Manajemen mutu pendidikan hendaknya menjadi agenda utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Konsep manajemen mutu pendidikan di lingkungan sekolah dapat dilihat dari hasil ujian peserta didik. Selain itu, bagaimana alumni dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata. Perubahan tingkah laku yang meliputi domain kognitif, afektif dan psikomotorik dapat dibuktikan dengan peran serta peserta didik dalam kehidupan masyarakat.⁷

Mutu dari pendidikan dapat diketahui dari pemenuhan delapan standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah. Delapan standar pendidikan tersebut meliputi: a) standar isi (pelaksanaan dan pengembangan kurikulum), b) standar proses, c) standar penilaian, d) standar kompetensi lulusan, e) standar pendidik dan tenaga kependidikan, f) standar pengelolaan elemen di institusi pendidikan, g) standar pembiayaan pendidikan, h) standar sarana dan prasarana pendidikan.

⁴Ulfah Irani, Dkk., Implementasi Manajemen Strategik dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Fajar Harapan, *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4 No. 2 (Januari, 2016), 59.

⁵Barnawi & M.Arifin, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori & Praktik* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017), 145.

⁶Ahmad Susanto, *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 205.

⁷Ibid.,147.

Berdasarkan dari delapan standar pendidikan diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memusatkan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dilihat dari penerapan manajemen mutu internal yang memiliki tiga unsur, yakni *input* (peserta didik), proses (pembelajaran), *output* (lulusan). Dan ketiga unsur tersebut tidak lepas dari kinerja seorang pendidik. Dalam proses pendidikan, guru merupakan bagian dari pendidik dan tenaga kependidikan. Yang mana guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik kearah kedewasaan, kematangan, dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Guru merupakan seseorang yang berhadapan langsung dengan peserta didik, maka dari itu peran guru berpengaruh besar terhadap kompetensi peserta didik. Dalam Undang- Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁸

Pembahasan

1. Pengertian Manajemen Mutu Internal

Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien. Di dalam manajemen terdapat sejumlah unsur pokok dalam membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia (*men*), barang- barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*methods*), uang (*money*), dan pasar (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing- masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.⁹

Dalam suatu organisasi, peningkatan mutu merupakan sarana dalam mewujudkan pencapaian tujuan dalam organisasi. Mutu adalah kepuasan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang dicapai oleh lembaga pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat di masa kini dan masa depan. Dalam konteks pendidikan, mutu proses pendidikan mentransformasikan berbagai jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik.¹⁰

Manajemen mutu adalah suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Diartikan juga bahwa manajemen mutu sebagai prosedur proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja dengan menekankan pada penjaminan proses agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu.¹¹

Konsep manajemen mutu dalam lembaga pendidikan adalah cara mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar menghasilkan layanan pendidikan yang sesuai atau bahkan

⁸Muhammad Fadhli, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, *TADBIR*, Vol. 1 No 02 (2017), 224.

⁹Candra Wijaya & Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 15-16.

¹⁰Muhammad Thoyyib, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam Kontemporer* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 17-18.

¹¹Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Buku Perkuliahan S-1 Jurusan Kependidikan Islam UIN Sunan Ampel, (tt) 9-10.

melampaui kebutuhan pelanggan. Tujuan manajemen mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara sekaligus meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- b. Sebagai bentuk peran aktif lembaga pendidikan dalam mewujudkan keinginan *stakeholder*.
- c. Memperoleh masukan agar implementasi manajemen sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial ekonomi, dan kompleksitas geografis.
- d. Menggalang kesadaran untuk meningkatkan mutu manajemen secara bersama- sama dan berkelanjutan.¹²

Dalam pengimplementasian manajemen mutu pendidikan, memerlukan strategi dasar. Strategi dasar diperlukan dalam proses implementasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Adapun strategi dasar implementasi mutu pendidikan meliputi:

- a. Mengidentifikasi masalah yang ada di lembaga.
- b. Mengadopsi filosofi tentang mutu.
- c. Usaha perbaikan dilakukan secara terus-menerus.
- d. Melibatkan para pemangku kepentingan.

Implementasi manajemen mutu pendidikan yang baik dapat diketahui dari ciri- ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki masukan siswa yang telah sesuai dengan potensi yang diharapkan kurikulum.
- b. Memiliki layanan pembelajaran yang sesuai dengan standar pembelajaran bermutu.
- c. Memiliki fasilitas sekolah yang mendukung efektivitas dan efisiensi belajar mengajar.
- d. Mampu menciptakan budaya sekolah yang kondusif.¹³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, manajemen mutu adalah suatu cara dalam lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai kepuasan pelanggan pendidikan dengan meningkatkan kinerja dan mutu kerja secara terus menerus.

Sedangkan yang dimaksud manajemen mutu internal adalah suatu sistem pengendalian dan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah melalui evaluasi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan kualitas lembaga pendidikan.

2. Otonomi Pendidikan

Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengelola dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan otonomi daerah, karena peningkatan manajemen mutu pendidikan tidak terlepas dari konsep otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah kemandirian daerah, dimana daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri tanpa mengupayakan campur tangan dari pemerintah di atasnya dan pemerintah pusat. Otonomi daerah juga merupakan perubahan

¹²Barnawi & M. Arifin, *Sistem Penjaminan*, 146.

¹³Ibid.,148.

politik yang menjanjikan banyak perubahan, setelah berjalan beberapa tahun otonomi daerah telah memunculkan banyak harapan, termasuk dalam bidang pendidikan.¹⁴

Menurut Umiarso yang dikutip oleh Arwildayanto, mengemukakan otonomi atau desentralisasi pendidikan mempunyai dua arti: pertama, menata kembali sistem pendidikan nasional yang sentralistik menuju suatu sistem yang memberikan peluang luas kepada inisiatif masyarakat setempat. Kedua, otonomi pendidikan bukan berarti melepaskan segala ikatan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan untuk memperkuat dasar-dasar pendidikan pada tingkat *grass root* guna membentuk suatu masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan kebinekaan masyarakat. Jadi makna otonomi pendidikan adalah warga sekolah diberikan kewenangan kesempatan berpartisipasi dalam mengelola pendidikan sesuai dengan peraturan pendidikan yang berlaku.¹⁵

Desentralisasi atau otonomi pendidikan dilakukan oleh pemerintah dengan motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan didasarkan pada otonomi pendidikan, maka pihak sekolah harus mampu menciptakan kemandirian untuk melaksanakan perbaikan diri. Kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan terbaik, kemampuan berdemokrasi/ menghargai pendapat orang lain, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Ada beberapa faktor pendorong penerapan otonomi pendidikan, antara lain:

- a. Tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.
- b. Anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
- c. Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
- d. Penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.
- e. Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.¹⁶

3. Pengendalian Mutu Pendidikan

Pengendalian ialah proses pemantauan, penilaian hingga pengevaluasian terhadap suatu kegiatan yang berlangsung agar tercapai hasil yang diharapkan.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud pengendalian mutu adalah suatu pemikiran dasar untuk menilai hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proses kegiatan produk atau jasa untuk mewujudkan mutu produk atau jasa yang berkesinambungan dalam konteks memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.¹⁸

Program pengendalian mutu digunakan untuk memberikan kontribusi yang mendasar pada pembentukan mutu produk atau jasa yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, karena

¹⁴Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Cendekia Press, 2018), 184.

¹⁵Ibid., 187.

¹⁶Arbangi, dkk., *Manajemen Mutu Pendidikan* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 31.

¹⁷Ahmad Susanto, *Manajemen Peningkatan*, 206.

¹⁸Hasan Baharun & Zamroni, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017), 71.

mutu merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi. Kendali mutu berfungsi untuk menjaga agar suatu sistem tetap efektif dalam memadukan pengembangan mutu, memelihara mutu dan memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi, sehingga produksi dan pemasaran dapat berada pada tingkat yang paling ekonomis.¹⁹

Menurut Syaodih dalam Ahmad Susanto menjelaskan, ada tiga cara pengendalian yang dilakukan oleh pemimpin, yaitu:

- a. Pengendalian umpan maju (*feedforward control*), yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai.
- b. Pengendalian konkruen (*concurrent control*), yaitu memusatkan kegiatan pengendalian pada apa yang sedang berjalan atau proses pelaksanaan pekerjaan.
- c. Pengendalian umpan balik (*feedback control*) atau disebut juga *post-action controls*, yaitu pengukuran dan perbaikan dilakukan setelah kegiatan dilakukan.

Adapun bidang garapan dalam pelaksanaan pengendalian mutu internal:

- a. Pemantauan kegiatan di kelas dan ruang praktik.
- b. Pemantauan kegiatan pembinaan siswa dan bimbingan konseling.
- c. Pemantauan kegiatan bidang kurikulum.
- d. Pemantauan kegiatan belajar di perpustakaan.
- e. Pemantauan kegiatan pengumpulan data internal dan eksternal siswa.
- f. Pemantauan kegiatan pengembangan sistem informasi pendidikan.
- g. Pemantauan kegiatan pembinaan dan pengembangan personel.
- h. Pemantauan penggunaan anggaran biaya.
- i. Pemantauan kegiatan pengembanagn sarana prasarana, dan fasilitas pendidikan.
- j. Pemantauan kegiatan kerja sama, layanan, dan hubungan dengan luar.
- k. Pemantauan kegaiatan penerimaan siswa, layanan lanjutan studi, dan penelusuran lulusan.²⁰

4. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu merupakan suatu konsep yang ada dalam manajemen mutu. Secara yuridis landasan sistem penjaminan mutu adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal ayat 21 yang menyebutkan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap lajur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Jaminan mutu internal (*internal quality assurance*) adalah proses ke arah penjaminan yang dapat memenuhi mutu yang dijanjikan dan yang diharapkan masyarakat. Kegiatan penjaminan mutu difokuskan pada proses membangun kepercayaan dengan cara pemenuhan segala persyaratan atau standar minimum sesuai yang diharapkan oleh pelanggan. Pada umumnya standar minimum diterapkan pada aspek masukan, proses, dan hasil.

Menurut Mariana dalam Barnawi dan M. Arifin mengemukakan, sistem penjaminan mutu pendidikan dikembangkan untuk tujuan berikut:

¹⁹Ibid., 72.

²⁰Ahmad Susanto, *Manajemen Peningkatan*, 208-212.

- a. Sebagai acuan dalam memetakan mutu pengelolaan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, sekolah dan pembelajaran.
- b. Proses dan produk SPMP dapat meyakinkan bahwa pendidikan dan pembelajaran telah diupayakan secara terus- menerus, memuaskan bagi peserta didik, orang tua siswa dan masyarakat, sumber daya pendidikan, dan para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan.
- c. Menentukan model fasilitasi peningkatan kinerja sekolah, meliputi sistem pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, dan pemberdayaan masyarakat pendidikan serta masyarakat luas dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.²¹

Aspek- aspek khusus yang perlu diperhatikan dalam pengembangan jaminan mutu antara lain:

- a. Kurikulum. Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan perlu memperhatikan pengorganisasian dan menetapkan sasaran yang jelas dalam upaya untuk mencapainya.
- b. Implementasi kurikulum dalam penjaminan mutu pendidikan difokuskan pada proses manajemen kurikulum, pembelajaran berkualitas yang didukung media pembelajaran, dan sistem penilaian yang dapat mengukur keberhasilan pendidikan.
- c. Peserta didik. Dalam mengendalikan mutu layanan pembelajaran perlu memperhatikan kondisi peserta didik meliputi tingkat kecerdasan, kesehatannya, minat dan bakatnya, suasana emosi, dan motivasi belajarnya.
- d. Kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru akan memengaruhi mutu unjuk kerjanya dalam melayani proses pembelajaran.
- e. Fasilitas pendidikan. Sekolah yang mengelola fasilitasnya dengan baik akan menciptakan kondisi menyenangkan dan akan menampilkan kenyamanan, keindahan, kemutakhiran, dan kemudahan dalam penggunaannya.
- f. Budaya sekolah. Kondisi tersebut dicerminkan pada terciptanya respon psikologis yang menyenangkan dari penghuni sekolah terhadap seluruh aspek lingkungan sekolah.
- g. Pembiayaan pendidikan. Penggunaan dana pendidikan yang diperoleh baik dari pemerintah, iuran orang tua siswa, dan dari masyarakat melalui komite sekolah perlu direncanakan sebaik-baiknya.
- h. Perhatian dan partisipasi masyarakat. Kepedulian masyarakat (termasuk orang tua) terhadap sekolah tidak hanya sekedar ditunjukkan oleh kesediaan membantu sekolah dalam bentuk fisik atau bantuan biaya akan tetapi pada masa kini kepedulian tersebut perlu mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan mutu layanan pembelajaran yang dilakukan.
- i. Perilaku manajemen pendidikan. Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan di sekolah perlu pula memperhatikan peluang untuk memberdayakan manajemen sekolah.
- j. Keasramaan. Keasramaan merupakan salah satu bentuk pelayanan khusus pada peserta didik pada penyelenggaraan pendidikan. Keasramaan merupakan bagian pelayanan terpadu terhadap pembinaan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa, serta keterampilan sehingga peserta didik dapat memiliki kesadaran diri, motivasi diri, pengaturan diri,

²¹Barnawi & M. Arifin, *Sistem Penjaminan*, 28-29.

empati, dan keterampilan sosial sehingga visi, misi, dan tujuan pendidikan dapat tercapai.²²

5. Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu merupakan sesuatu yang dianggap salah satu bagian penting, karena mutu pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu produk jika dibandingkan dengan produk lainnya. Peningkatan mutu merupakan usaha dari setiap lembaga- lembaga penghasil produk barang dan juga produk jasa untuk mencapai hasil yang berkualitas dan relevan.²³ Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilihat dari banyak sisi. Menurut Hadis dan Nur Hayati yang dikutip oleh Muh. Fadhli menjelaskan dalam persepektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional.²⁴

Konsep peningkatan mutu diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia (pasal 1 Nomor 17 UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan pasal 3 PP.19/2005 tentang SNP), dimana SNP berfungsi sebagai dasar dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan Negara dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat.

Adapun komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan, adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- b. Standar isi, adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar proses, adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu- satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana, adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

²²Sitti Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, tt), 24-25.

²³Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan*, 216.

²⁴Ibid., 217.

- f. Standar pengelolaan, adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan pendidikan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- h. Standar penilaian pendidikan, adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik.²⁵

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, bahwasannya mutu menjadi aspek terpenting dalam setiap organisasi. Dimana mutu diyakini sebagai modal utama dalam menghadapi persaingan organisasi. Oleh sebab itu, mengelola sebuah organisasi haruslah secara komprehensif dan terintegrasi. Selanjutnya, pengelolaan manajemen mutu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Manajemen mutu berusaha meningkatkan mutu pekerjaan, produktivitas dan efisiensi melalui perbaikan kinerja baik internal maupun eksternal.

Manajemen mutu internal terpacu oleh adanya otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan. Otonomi pendidikan yang diberikan kepada sekolah, menghasilkan sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolah sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program dan rencana strategisnya yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, penerapan manajemen mutu internal dapat menghasilkan produk yang terjamin mutunya.

Daftar referensi

- Ahmad Susanto, *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Arbangi, dkk., *Manajemen Mutu Pendidikan* (Depok: Prenamedia Group, 2016).
- Arwildayanto, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Cendekia Press, 2018).
- Barnawi & M.Arifin, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori & Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).
- Candra Wijaya & Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Perdana Publishing, 2016).
- Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Buku Perkuliahan S-1 Jurusan Kependidikan Islam UIN Sunan Ampel, (tt).
- Hasan Baharun & Zamroni, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017).
- Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, *TADBIR*, Vol. 1 No 02 (2017).

²⁵Barnawi & M. Arifin, *Sistem Penjaminan*, 79.

- Muhammad Thoyyib, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam Kontemporer* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012).
- Muhibbuddin Abdulmuid, *Manajemen Pendidikan* (Jawa Tengah: Pengging Mangkunegaran, 2013).
- Sitti Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, tt).
- Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Umum, 2017).
- Ulfah Irani, Dkk., Implementasi Manajemen Strategik dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 10 Fajar Harapan, *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4 No. 2 (Januari, 2016).